



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Majapahit No. 44 Mataram Telepon : (0370) 7856244, Faksimile : 625341

Laman : ntb.kemenkumham.go.id , Email : kanwilntb@kemenkumham.go.id

Nomor : W.21-PP.02.03- 1033 26 Februari 2024
Sifat : Penting
Lampiran : 6 (Enam) Berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian
Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Dompu

Yth.Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu;
di tempat

Menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu Nomor : 180/17/Kum tanggal 5 Januari 2024; 188/05/Kum tanggal 10 Januari 2024; 188/31/Kum tanggal 29 Januari 2024; 188/32/Kum tanggal 29 Januari 2024; 188/33/Kum tanggal 29 Januari 2024; 188/34/Kum tanggal 29 Januari 2024; perihal permohonan harmonisasi, pembulatan, dan pementapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Dompu tentang :

1. Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengenaan, Penghitungan, Pelaporan Dan Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Daerah Yang Berasal Dari Keuntungan Bersih Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus ;
2. Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dompu Nomor 17 Tahun 2023 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara;
3. Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2024 ;
4. Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 ;
5. Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024 ;
6. Rancangan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan, Tunjangan Jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan Dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa Dan Insentif Ketua Rukun Tetangga Tahun Anggaran 2024 ;

Diinformasikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Kepala Daerah tersebut telah selesai dilakukan Pengharmonisasian Pembedaan Dan Pemantapan Konsep Rancangan Peraturan Daerah oleh Tim Kelompok Kerja Pengharmonisasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan hal tersebut maka Rancangan Peraturan Daerah/ Rancangan Peraturan Kepala Daerah dimaksud di atas dapat ditindaklanjuti ke tahapan berikutnya.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Parlindungan

NIP 197007011992031002